

**KETERLIBATAN MASYARAKAT SIPIL SEBAGAI BAGIAN DARI GLOBAL PARTNERSHIP
FOR THE PREVENTION OF ARMED CONFLICT (GPPAC) DALAM INISIASI PROSES
PERDAMAIAN DI SEMENANJUNG KOREA**

**THE INVOLVEMENT OF CIVIL SOCIETY AS PART OF GLOBAL PARTNERSHIP FOR THE
PREVENTION OF ARMED CONFLICT (GPPAC) IN PEACE PROCESS INITIATION IN THE
KOREAN PENINSULA**

I Gede Sumertha¹, I Nyoman Astawa², Devy Indah Paramitha³
Prodi Damai dan Resolusi Konflik
Fakultas Keamanan Nasional
Universitas Pertahanan
(email: devy.paramitha@idu.ac.id)

Abstrak – Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa keterlibatan masyarakat sipil sebagai bagian dari *Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict* (GPPAC) dalam inisiasi proses perdamaian di Semenanjung Korea melalui pendekatan di level *grassroot* atau *track II* sebagai sebuah alternatif penyelesaian konflik Korea Utara dan Selatan di tengah proses dialog *track I* yang sudah tidak lagi efektif sejak Korea Utara memutuskan untuk keluar dari forum *six party talk* di tahun 2009. Untuk menganalisa fenomena tersebut, tulisan ini menggunakan Teori Konflik dan Teori Resolusi Konflik dari James A. Schellenberg dan Ho-Won Jeong serta konsep *Civic Engagement* dan Diplomasi Preventif. Tulisan ini diharapkan mampu membuka perspektif bahwa peluang dalam membangun perdamaian dapat dicapai melalui banyak cara. Keterlibatan masyarakat sipil dalam inisiasi proses perdamaian di semenanjung Korea dilakukan melalui dialog serta berbagai interaksi yang sifatnya *people to people* untuk menumbuhkan kembali “*cheong*” atau “*we-ness*” pihak berkonflik. Meskipun demikian, keterlibatan masyarakat sipil masih belum optimal karena masih harus dihadapkan oleh beberapa dinamika antara lain kuatnya memori kolektif pihak yang berkonflik, menurunnya atensi serta dukungan generasi milenial Korea Selatan terkait unifikasi, masalah pendanaan, dan kuatnya pengaruh Amerika Serikat di Kawasan Asia Timur.

Kata Kunci: Masyarakat Sipil, GPPAC, Proses Perdamaian, Semenanjung Korea

¹ Mayjen TNI (Purn) I Gede Sumertha, KY., P.SC., M.Sc merupakan Dosen Program Studi Damai dan Resolusi Konflik Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan

² Letkol Caj Drs. I Nyoman Astawa, M.M., M.Phil merupakan Dosen Program Studi Damai dan Resolusi Konflik Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan

³ Devy Indah Paramitha, S.IP., M.Han merupakan lulusan dari Program Pascasarjana Program Studi Damai dan Resolusi Konflik Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan

Abstrack – This research aimed to analyzed the involvement of civil society as part of Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict (GPPAC) in peace process initiation in the Korean Peninsula through grassroot level or track II approach as a conflict resolution alternatives of South and North Korea dispute in the middle of absence of track I dialogue and negotiation after North Korea decided to leave Six Party Talk forum in year 2009. To analyze the problem, this paper used Theory of Conflict and Conflict Resolution Theory by James A. Schellenberg and Ho-Won Jeong and Civic Engagement Concept along with preventive diplomacy concept. This paper is highly assumed to open another perspective that peace process can be achieved in many ways. The involvement of civil society in peace process initiation in the Korean Peninsula is done by dialogue and another people to people approach to regenerate “Cheong” or “we-ness” between conflicting parties. Thus, civil society involvement is not really optimal yet due to dynamics of disputants such as collective memory about war, attention and support from milenial generaton in South Korea that is not longer exist, issues relating to funding, and strong influence from United State of America (USA) in the Korean Peninsula.

Key Word: Civil Society Organization, GPPAC, Peace Process, Korean Peninsula

Latar Belakang

Perimbangan kekuatan antara Korea Utara dan Korea Selatan tidak dapat dihindari. Mengingat sistem internasional akan selalu anarkis karena tidak adanya lembaga internasional yang dapat mencegah terjadinya perang dan juga konflik. Persepsi ancaman antara Kora Utara dan Selatan yang kuat membuat stabilitas keamanan di Semenanjung Korea semakin tidak dapat diprediksi dan memungkinkan konflik dengan eskalasi yang jauh lebih besar di masa yang akan datang tidak dapat dihindari. Tindakan Korea Utara yang tidak dapat diprediksi juga membuat Semenanjung Korea menjadi *flash point* yang sangat berbahaya. Hal

tersebut dapat mengancam keamanan tidak hanya bagi Korea Utara dan Korea Selatan saja namun juga mengancam stabilitas dan keamanan regional serta global. Sehingga, perlu upaya proses resolusi konflik untuk menciptakan perdamaian di Semenanjung Korea guna menciptakan perdamaian yang positif.⁴

Proses perundingan untuk mencapai perdamaian di Semenanjung Korea telah dilakukan beberapa kali dengan melibatkan beberapa negara seperti China, Rusia, Amerika Serikat, dan Jepang. Ke-empat negara tersebut

⁴ Kearney, Caroline. 2017. *Strengthening Understanding Through Dialogue: A Peacebuilding Approach to the Korean Peninsula Conflict*. Siem Reap: Centre for Peace and Conflict Studies. Hal: 18

turut menjembatani perundingan damai antara Korea Utara dan Korea Selatan, yang dikenal dengan istilah *six party talk*. Namun, *six party talk* tidak lagi efektif ketika pada April 2009 Korea Utara memutuskan untuk keluar dari forum multilateral tersebut.⁵ Hal ini menunjukkan bahwa upaya membangun perdamaian yang selama ini dilakukan dalam tingkatan negara terkait konflik di Semenanjung Korea tidak serta merta efektif.

Ketegangan yang semakin intensif tidak menutup kemungkinan akan menyebabkan terjadinya konflik yang jauh lebih besar di kemudian hari. Oleh karena itu, perdamaian di Semenanjung Korea merupakan hal yang harus terus diupayakan. Mengingat level negara tidak cukup berhasil dalam menciptakan perdamaian di Semenanjung Korea maka tidak sedikit pula organisasi non-negara yang turut serta mengupayakan perdamaian di Semenanjung Korea melalui pendekatan di level *grassroot* yang melibatkan peran dari masyarakat sipil baik di kedua negara yang berkonflik juga dari masyarakat

Internasional yang *concern* terhadap perdamaian di Semenanjung Korea.

Terdapat beberapa contoh keberhasilan masyarakat sipil dalam proses perdamaian guna mencapai tahap rekonsiliasi demi mewujudkan perdamaian. Diantaranya ialah keterlibatan *the Regional Coordination for Economic and Social Research (CRIES)* yang juga merupakan salah satu anggota dari GPPAC dalam menginisiasi dialog akademik yang membahas terkait upaya resolusi dan rekonsiliasi hubungan Amerika Serikat dan Cuba di tahun 2009. Dengan melibatkan Universitas Amerika dan Universitas Havana yang kemudian disebut dengan *TACE (Taller Academico Cuba - EEUU)* yang merupakan akronim bahasa spanyol dari *the umbrella of the Cuba – United States Academic Workshop*, TACE membangun dialog dan pertemuan-pertemuan yang dilakukan di Brazil dan beberapa tempat lainnya. Setelah diadakan beberapa kali pertemuan antara tahun 2009 hingga 2013, dihasilkan beberapa konsensus dan rekomendasi terkait hubungan antara Amerika Serikat dan Cuba yang dipresentasikan secara resmi di

⁵ Ibid

Washington D.C dan Havana.⁶ Hasilnya ialah, pada tahun 2013 Amerika Serikat dan Kuba bersepakat untuk melakukan normalisasi hubungan setelah lebih dari 50 tahun kedua negara saling bermusuhan.⁷ TACE dianggap menjadi salah satu pihak yang turut berkontribusi, mengingat normalisasi tersebut juga dipengaruhi oleh adanya asimiliasi dari rekomendasi yang diberikan oleh TACE.

Hal ini menunjukkan bahwa “*citizen diplomacy*” memang tidak dapat menggantikan diplomasi yang dilakukan secara resmi oleh pemerintah dalam menyelesaikan konfrontasi namun posisi dari “*citizen diplomacy*” lebih kepada membantu dalam mendorong serta mempercepat tindakan birokrasi dalam memperbaiki hubungan dan mengatasi ketegangan antara Amerika Serikat dan Kuba. Apabila melihat pada contoh kasus tersebut, dapat dilihat bahwa masyarakat sipil mampu menjadi

pendukung ataupun inisiator dalam proses perdamaian selain negara.⁸

Sebagai upaya untuk membangun perdamaian di Semenanjung Korea, terdapat beberapa komunitas masyarakat sipil internasional yang terlibat salah satunya ialah GPPAC (*The Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict*). Dalam rangka mencegah eskalasi konflik di semenanjung Korea, GPPAC berupaya untuk membangun kepercayaan dengan menggelar dialog perdamaian yang salah satunya digelar di *Ulaanbaatar* Mongolia. Inisiasi upaya perdamaian di Semenanjung Korea oleh GPPAC khususnya oleh GPPAC kontributor kawasan *Northeast Asia* dimulai pada tahun 2005 dan berlangsung hingga sampai saat ini.⁹

Setelah forum multilateral *six party talk* mengalami jalan buntu, maka tidak ada lagi mekanisme regional guna membangun dialog antar pemerintah. Oleh karena itu, terdapat peluang yang cukup besar bagi masyarakat sipil internasional untuk turut berkontribusi

⁶ Ana Bourse, dkk. 2015. *Creating Spaces for Dialogue: a Role for Civil Society*. Den Hague: GPPAC (Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict) didownload dari http://www.gppac.net/documents/130492842/131171520/060-009_creating+Spaces_DigitalPublication.pdf pada 14/03/2017 pukul 14.59. Hal: 18-39

⁷ Ibid Hal. 22

⁸ Ibid Hal. 42-43

⁹ *Ulaanbaatar Process for Dialogue in Northeast Asia*, diakses melalui <http://www.gppac.net/ulaanbaatar-process>, diakses 15 Agustus 2017 pukul

dalam membangun perdamaian di Semenanjung Korea. Oleh karenanya, dalam tulisan ini akan membahas mengenai bagaimana keterlibatan masyarakat sipil sebagai bagian dari *The Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict* (GPPAC) dalam inisiasi proses perdamaian di Semenanjung Korea dan bagaimana dinamika yang dihadapi oleh GPPAC dalam proses tersebut.

Teori dan Konsep

Teori Konflik

Merujuk pendapat Johan Galtung, konflik merupakan sebuah kondisi dimana negara atau individu merasa dilema dan terancam atas kehadiran pihak lainnya.¹⁰ Dalam artian, baik itu terjadi ataupun tidak terjadi kekerasan sekalipun, apabila suatu pihak merasakan adanya tantangan dan ancaman dari pihak lain maka hal tersebut mengindikasikan adanya sebuah konflik. Hal ini merujuk pada Boulding yang menyatakan bahwa “*Conflict exists when any potential position of two behaviour units are*

mutually incompatible”.¹¹ Oleh karenanya, dapat dinyatakan bahwa pengertian sederhana dari konflik ialah sebuah fenomena dinamis dimana salah satu aktor melakukan reaksi atas apa yang dilakukan oleh aktor lainnya, dinamika reaksi tersebut tidak jarang berlanjut dalam aksi yang lebih jauh dan bisa saja memicu kerusuhan dan bahkan perang diantara mereka.

Teori konflik memiliki berbagai macam versi dan teori turunan lainnya. Meskipun memiliki terminologi serta fokus yang berbeda, namun seluruh teori konflik yang ada tetap memiliki *concern* yang sama tentang konseptualisasi bagaimana pertentangan yang terjadi diekspresikan oleh pihak yang berkonflik dan diselesaikan melalui sejumlah cara.¹² Oleh karenanya, sebagai dasar dalam menganalisa konflik di semenanjung Korea, dalam tulisan ini digunakan teori konflik melalui perspektif *social structural theory*.

Teori sosial struktural ialah salah satu turunan dari teori konflik yang

¹⁰ Johan Galtung. 2017. *Hanbook of Peace and Conflict Studies*. New York: Routledge, Hal. 131

¹¹ Kenneth E. Boulding. 1963. *Conflict and Defense*. New York: Harper, Hal. 04

¹² James A. Schellenberg. 1996. *Conflict Resolution: Theory, Research, and Practice*. New York: State University of New York Press, Hal. 12

mendefinisikan konflik merupakan produk dari bagaimana sebuah masyarakat atau kondisi sosial dibentuk dan dikelola. Apabila merujuk pada kontestasi global maka, hal tersebut lebih mengerucut kepada hubungan antar negara yang saling berseberangan dimana ketegangan yang ada banyak diakibatkan oleh mekanisme struktural yang terjadi secara global baik secara militer maupun politik. Hal ini merujuk pada pendapat dari Wallerstein yang menyatakan bahwa perbedaan kekuatan politik dan ekonomi dunia akan mengakibatkan friksi dan ketegangan diantara negara-negara yang ada.¹³

Apabila karakteristik tersebut dikaitkan dengan kondisi konflik di Semenanjung Korea, maka kondisi sosial struktural yang dimaksud ialah bahwa konflik di Semenanjung Korea pada masa ini merupakan hasil manifestasi struktural dari perang dunia II (penjajahan Jepang di Semenanjung Korea) dan perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet di masa

lalu yang pada akhirnya memicu terjadinya Perang Korea di tahun 1950.¹⁴ Selain itu, kondisi struktural sosial yang membentuk ketegangan di Semenanjung Korea pada saat ini juga banyak dipengaruhi oleh keberadaan aliansi Amerika Serikat dan Korea Selatan di Semenanjung Korea yang disisi lain menjadi dilema keamanan bagi Korea Utara.¹⁵ Oleh karenanya, kondisi *balance of power* tidak dapat dihandari antara kedua negara. Hal inilah yang kemudian menjadikan ketegangan terus berlanjut. Ketegangan yang terus terjadi tidak menutup kemungkinan dapat tereskalasi menjadi konflik yang lebih besar dan tentunya dapat mengancam keamanan kawasan dan global.

Teori Resolusi Konflik

Setiap konflik memiliki karakteristik yang berbeda, dan tidak jarang sebuah konflik akan terus berlangsung apabila terjadi *unsatisfaction situation* dimana kedua belah pihak masih belum menemukan satu persamaan terkait kepentingan

¹³ Immanuel Wallerstein. 1974. *The Modern World System*. New York: Academic Press, Hal. 224

¹⁴ Robert L. Worden. 2008. *North Korea: A Country Study*. Library of Congress: Federal Research Division, Hal. 44

¹⁵ Op.Cit. Johan Galtung, Hal. 113

mereka.¹⁶ Kondisi tersebut diistilahkan sebagai *protracted conflict*, yakni konflik yang berlangsung dalam kurun waktu yang sangat lama. Salah satu contoh dari *protracted conflict* ialah konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan yang berlangsung hingga lebih dari 60 tahun.

Konflik merupakan bagian dari *human nature*, sehingga bagaimanapun tidak akan dapat dihindari. Namun demikian, konflik tetap bisa dikendalikan dengan cara mencari jalan penyelesaian agar konflik tidak tereskalasi sehingga menghasilkan dampak yang lebih besar. Salah satu alternatif untuk mencari jalan keluar permasalahan yang ada ialah dengan resolusi Konflik.

Resolusi konflik adalah upaya untuk membuat pihak yang sedang berkonflik agar mencapai suatu kesepakatan baik melalui adanya perubahan lingkungan atau melalui keterlibatan pihak ketiga.¹⁷ Tidak jarang dalam *protracted conflict* yang telah berlangsung cukup lama, seringkali tidak jelas bagaimana memprediksi

kapan resolusi dapat dicapai mengingat persepsi hasil yang ingin dicapai tentu akan berbeda diantara pihak-pihak yang terkait mengingat tujuan dan masalah yang dimiliki tentu berbeda satu dengan yang lainnya.¹⁸

Untuk menjelaskan mengenai inisiasi proses perdamaian di Semenanjung Korea oleh masyarakat sipil, dalam tulisan ini digunakan beberapa variabel dalam teori resolusi konflik yang dianggap mampu menjawab permasalahan yang menjadi pertanyaan. Terdapat beberapa pendekatan yang ditawarkan sebagai instrumen resolusi konflik, yakni:¹⁹

a. Gradual Reform

Yakni memungkinkan adanya perubahan terhadap struktur sosial yang ada di negara atau masyarakat yang bertikai. Perubahan tersebut dapat berupa perubahan pola hubungan masyarakat atau pihak yang berkonflik ataupun dalam tatanan kebijakan. Tidak mudah untuk melakukan perubahan, oleh karenanya perlu cara dan waktu yang bertahap dan konstan.

b. Non-Violent Confrontation

¹⁶ Ho-Won Jeong. 2010. *Conflict Management and Resolution: An Introduction*. New York: Routledge, Hal. 03

¹⁷ Op.Cit. James A. Schellenberg, Hal. 09

¹⁸ Op. Cit. Ho-Won Jeong, Hal. 12

¹⁹ Op. Cit. James A. Schellenberg, Hal. 99-100

ialah salah satu pendekatan resolusi konflik dalam mekanisme teori sosial struktural. Berbeda dengan pendekatan *gradual reform* yang lebih melihat kepada tujuan atau hasilnya. *Non-Violent Confrontation* justru lebih mengarah pada upaya dan tindakan yang dilakukan untuk melakukan perubahan sosial yang fundamental dalam sebuah konflik dengan cara-cara damai atau *non-violent*. Kegiatan tersebut dapat dilakukan oleh semua pihak, baik melalui *track I* yakni pemerintah atau *track II* yakni masyarakat sipil/ *civil society organization*.

Fasilitasi merupakan salah satu langkah awal untuk mencairkan hubungan pihak yang berkonflik. Sehingga, tidak heran jika dasar dari proses ini ialah membangun “*mutual understanding of the issues and problem*” melalui *group discussion* dan juga dialog.²⁰ Untuk meningkatkan *trust* dan *understanding*, dapat dilakukan melalui berbagai metode komunikasi. Fasilitasi ialah “*the art of possible that derived from bringing the adversaries to forge mutual understanding on specific*

issues instead of position taking”.²¹ Dengan demikian, fasilitasi cukup berbeda dengan negosiasi dimana proses fasilitasi lebih menitik beratkan pada dialog yang bertujuan untuk membangun sebuah *mutual understanding* terlebih dahulu, berbeda dengan negosiasi yang lebih berorientasi kepada memuaskan kepentingan pihak yang terlibat.

Sasaran dari proses dialog ialah membangun dan mengembangkan *framework* bersama terkait permasalahan yang ada. Untuk itu, proses fasilitasi (dialog) lebih banyak dilakukan oleh pihak ketiga yang kebanyakan diantaranya ialah kelompok masyarakat sipil. Hal ini sesuai dengan konsep *human development* yang dipopulerkan oleh UNDP (*United Nation Development Program*) dan perwakilan UN lainnya yang berfokus pada membangun dari *grassroot*-nya.²²

Sebagai upaya inisiasi perdamaian di Semenanjung Korea, GPPAC salah satunya juga mengupayakan adanya dialog. Tujuan dialog ialah untuk mengembangkan pendekatan kebersamaan dalam rangka resolusi

²⁰ Op. Cit. Ho-Won Jeong, Hal. 192-193

²¹ Ibid

²² Ibid, Hal. 198

konflik dan upaya memperbaiki hubungan antara individu atau kelompok yang ada.

Konsep Diplomasi Preventif

Konsep diplomasi preventif pertama kali dikemukakan oleh sekretaris jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Dag Hammarskjold hampir setengah abad lalu dalam buku laporan tahunan tahun 1959 yang menyatakan bahwa diplomasi preventif aktif dapat dilakukan oleh setiap kelompok baik melalui PBB maupun perwakilan dari organisasi lainnya yang memiliki posisi netral untuk melakukan intervensi.²³

Sekretaris jenderal Boutros Boutros-Ghali dalam laporannya yang berjudul *An Agenda for Peace: Preventive Diplomacy, Peacemaking and Peacekeeping* menyebutkan bahwa diplomasi preventif merupakan:

*“.....an action to prevent disputes from arising between parties, to prevent existing disputes from escalating into conflicts and to limit the spread of the latter when they occur”.*²⁴

²³ Bertrand G. Ramcharan. 2008. *Preventive Diplomacy at the UN*. Indiana University Press: Bloomington. Hal-28-32 didownload melalui [http://dl.lux.bookfi.net/genesis/537000/89a3b9c50dcba19900da3f316dbdfcad/_as/%5BBertrand_G._Ramcharan%5D_Preventive_Diplomacy_at_the_UN\(BookFi\).pdf](http://dl.lux.bookfi.net/genesis/537000/89a3b9c50dcba19900da3f316dbdfcad/_as/%5BBertrand_G._Ramcharan%5D_Preventive_Diplomacy_at_the_UN(BookFi).pdf) pada 11/11/2016 pukul 17.28 wib

²⁴ Ibid. 45

Sehingga, untuk menjaga perdamaian dunia perlu adanya diplomasi preventif sebagai upaya mencegah perselisihan antara dua kelompok menjadi semakin meningkat dan membatasi efek dari perselisihan tersebut agar tidak meluas. Adapun sasaran dari diplomasi preventif ialah untuk mengidentifikasi situasi yang dapat memunculkan konflik dan melalui diplomasi, bahaya dari situasi tersebut dapat dihindari sebelum memunculkan terjadinya kekerasan.

Diplomasi preventif memiliki dua dimensi tujuan yakni untuk mengurangi ketegangan sebelum menimbulkan konflik yang lebih besar dan untuk mengambil tindakan secara cepat dalam mengendalikan agar dampak konflik tidak menyebar apabila konflik terjadi. Diplomasi preventif dapat dilakukan melalui beberapa cara, diantaranya ialah fasilitasi, mediasi, rekonsiliasi, ajudikasi, dan arbitrase.²⁵

Secara umum, diplomasi merupakan cara bernegosiasi dan berdialog dengan pihak lainnya guna mewujudkan kepentingan yang dimiliki.

²⁵ Muggah, R & White, N. 2013. *Is There a Preventive Action Renaissance? The Policy and Practice of Preventive Diplomacy and Conflict Prevention*. NOREF. Hal. 13

Upaya diplomasi dapat dilakukan melalui berbagai macam cara dengan melibatkan aktor dari berbagai macam unsur. Salah satu unsur yang sering terlibat dalam upaya diplomasi ialah organisasi non-pemerintah (NGO). Keterlibatan organisasi non-pemerintah dalam diplomasi disebut dengan *track II diplomacy*. Dalam paradigma *conflict preventive*, *Track II* merupakan salah satu alternatif yang dapat dilakukan apabila diplomasi melalui *track I* dirasa tidak cukup efektif untuk meredam ketegangan dari kedua pihak yang berkonflik.

Seperti halnya dalam proses perdamaian di Semenanjung Korea, dimana dalam level *track I* yang melibatkan negara sebagai instrumen penyelesaian konflik tidak menunjukkan hasil yang positif. Hal ini berkaitan dengan kepentingan nasional negara-negara tersebut. Ketegangan di semenanjung Korea tidak dapat dihindari dan setiap hari semakin intensif, oleh karenanya sebagai upaya alternatif penyelesaian konflik maka perlu ada keterlibatan pihak yang lebih netral dan tidak memiliki kepentingan lain selain untuk perdamaian.

Kehadiran GPPAC merupakan bentuk dari *track II* diplomasi dan bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik dengan eskalasi yang lebih besar yang dapat mengancam keamanan di kawasan dan global. Dalam upaya diplomasi yang dilakukan, GPPAC mengedepankan upaya dialog untuk membangun *confidence* dan *trust* pihak yang berkonflik melalui tatanan *grassroot* atau masyarakat sebagai salah satu upaya menciptakan perdamaian di Semenanjung Korea melalui *track II diplomacy*.

Konsep Civic Engagement

Pada dasarnya, konsep keterlibatan warga negara (masyarakat) meliputi cakupan yang sangat luas karena seringkali didefinisikan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan pihak yang menggunakan konsep tersebut. *Civic engagement* ialah “*individual and collective actions designed to identify and address issues of public concern*”.²⁶ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa *civic engagement* merujuk pada aksi kolektif atau individual yang bertujuan untuk

²⁶ Mark Pancer. 2015. *The Psychology of Citizenship and Civic Engagement*. Oxford: Oxford University Press. Hal. 03

mengidentifikasi serta menyampaikan isu yang menjadi perhatian publik. Merujuk pada pendapat tersebut, hal yang menjadi perhatian publik berkenaan dengan semenanjung Korea tidak lain ialah terkait proses perdamaian yang berusaha untuk dibangun melalui *track II*.

Merujuk pada Putnam, salah satu hal yang diperhatikan sebagai wujud pembentukan *network* atau jaringan dalam *civic engagement* ialah membangun norma-norma dan kepercayaan yang dapat memfasilitasi terbentuknya koordinasi guna mencapai tujuan bersama yang di cita-citakan yang dalam hal ini ialah perdamaian.²⁷ Konsep *civic engagement* tersebut sesuai dengan keterlibatan GPPAC dalam proses perdamaian di Semenanjung Korea. Secara umum GPPAC dalam menjalankan keterlibatannya dalam upaya mendorong perdamaian didasarkan kepada empat strategi dasar yang diantaranya ialah:²⁸

- a. *Network Strengthening and Regional Action*
- b. *Action Learning*
- c. *Public Outreach*
- d. *Policy and Advocacy*

Hal tersebut dilakukan dengan paradigma bahwa masyarakat sipil memiliki fleksibilitas dan pengalaman yang dapat menjadi peluang atau *opportunity* guna membangun dan terlibat dalam proses dialog yang dilakukan. Dalam menjalankan strateginya, GPPAC bekerjasama dan berkolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat yang disebut dengan jaringan. Jaringan tersebut dibentuk guna mencapai sinergitas dalam mencegah konflik dan membangun perdamaian dengan menghubungkan dan bekerja di berbagai level baik negara, regional, dan global yang didalamnya terdiri dari berbagai organisasi antar pemerintah, aktor negara, media, dan akademisi.

Pembahasan

Lebih dari 60 tahun berakhirnya perang Korea, kedua negara masih belum menyepakati perjanjian damai.

²⁷ Robert D. Putnam. 1992. *Making Democracy Work: Civic Tradition in Modern Italy*. New Jersey: Princeton University Press. Hal. 167

²⁸ Enkhsaikhan, Jargalsaikhan, 2016. *Ulaanbaatar Process: It's Philosophy, Practice, and Achievements*. RECNA policy paper, 3. pp1-46. Universitas Nagasaki Jepang didownload

melalui <http://naosite.lb.nagasaki-u.ac.jp/dspace/bitstream/10069/36667/3/REC-PP-03-EN.pdf> pada 21/06/2017 pukul 10.22 wib. Hal. 04-06

Sehingga, secara administratif kedua negara bisa dikatakan masih dalam status berperang. Kondisi tersebut tentu menimbulkan persepsi ancaman oleh kedua pihak, sehingga perlombaan senjata dan provokasi pun tidak dapat dihindari. Apabila hal tersebut terus terjadi dan berulang-ulang, maka bukan tidak mungkin perang akan kembali terjadi. Oleh karena itu, merujuk pada konsep *preventive diplomacy* maka perlu upaya untuk mencegah agar konflik tersebut tidak tereskalasi dan berdampak bagi stabilitas keamanan dengan cara-cara yang diplomatis atau *non-violence*.

Untuk itu, beberapa kali telah dilakukan upaya proses perdamaian di Semenanjung Korea. Salah satu upaya yang dilakukan ialah dengan menyelenggarakan perundingan *six party talk* dengan melibatkan enam negara yakni Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan dan Korea Utara. Namun, perundingan tersebut resmi dihentikan pada tahun 2009 setelah Korea Utara memutuskan untuk keluar, sehingga sampai saat ini masih belum ada interaksi diplomatik yang serius untuk mencari solusi damai.

Gagalnya perundingan *six party talk* memberikan implikasi terhadap semakin memanasnya hubungan kedua negara.

Perkembangan konflik di semenanjung Korea beberapa tahun terakhir memang cenderung susah untuk diprediksi dan eskalasi yang terus meningkat perlu dilakukan langkah antisipasi atau *preventive*. Perbedaan politik dan adanya campur tangan kepentingan eksternal (Amerika Serikat) menjadi salah satu kendala untuk perwujudan perdamaian di semenanjung Korea melalui level *track I*. Tercatat beberapa kali dilakukan upaya resolusi konflik di Semenanjung Korea melalui level *track I* yang antara lain ialah sebagai berikut:

- a. Tahun 1994 dilakukan kesepakatan antara Korea Utara dan Amerika Serikat mengenai penghentian program nuklir dan pemberian bantuan ekonomi untuk Korea Utara. Namun program tersebut gagal karena tidak adanya komitmen yang kuat dari kedua belah pihak²⁹
- b. Tahun 1998 Korea Selatan menginisiasi dilakukannya

²⁹ Op. Cit. Kearney. Hal. 44

reunifikasi melalui dialog bilateral, dan investasi ekonomi yang terwujud dalam *sunshine policy*, namun gagal setelah terjadi perubahan arah kebijakan Korea Selatan karena adanya perubahan kepemimpinan dari Lee Myung Bak ke Park Geun Hye³⁰

Rasa curiga, ancaman, retorika, dan segala rasa ketakutan akan eskalasi militer yang sewaktu-waktu dapat terjadi di Semenanjung Korea merupakan sebuah *lock point* akibat interaksi politik era perang dingin pada masa lampau. Sejak terhentinya *six party talk* di tahun 2009, masyarakat sipil mencoba untuk melakukan inisiatif yang menjadi langkah awal untuk membangun kembali dialog dalam level *track II* yang sebelumnya terhenti di level *track I*.

Pada dasarnya, proses inisiasi perdamaian oleh masyarakat sipil dilakukan secara *parsial* atau bukan dalam satu bentuk *grand design reconciliation*.³¹ Adapun bentuk-bentuk bagaimana masyarakat sipil dilibatkan dalam proses inisiasi perdamaian

diantaranya ialah dengan menginisiasi pertemuan keluarga oleh Palang Merah Internasional, pertukaran budaya, dan dialog perdamaian lainnya. Meskipun dilakukan secara parsial, hal tersebut tetap mengindikasikan bahwa masih ada komitmen yang kuat dari masyarakat sipil untuk berusaha mencairkan ketegangan dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya lebih sosial dan kemanusiaan. Hal ini sesuai dengan teori Resolusi Konflik yang menyatakan bahwa untuk mencapai sebuah resolusi maka perlu komitmen pihak yang ada untuk bersama-sama mencari jalan keluar untuk menghasilkan *win-win solution*. Adapun solusi yang sifatnya *win-win* tersebut tergantung pada konstelasi kepentingan pihak yang terlibat.³²

Masyarakat sipil melalui pendekatan di tingkat *grassroot* bisa menjadi pilihan alternatif yang tepat untuk proses resolusi konflik di Semenanjung Korea. Posisi masyarakat sipil akan lebih sesuai karena tidak memiliki banyak kepentingan politis. Berbeda dengan *track I* yang banyak dipengaruhi *cost and benefit* terkait

³⁰ Ibid. Hal. 75

³¹ Dr. Ichsan Malik, Wawancara dilakukan pada tanggal 5 Desember 2017 di Universitas Pertahanan

³² Op.Cit. Ho-Won Jeong, Hal. 11

national interest yang dimiliki. Dalam keterlibatannya, organisasi masyarakat sipil menggunakan cara-cara *non-confrontation* dengan tujuan agar mampu mengikat masyarakat sipil atau *Civil Society Organization (CSO)*³³ negara yang berkonflik ke dalam sebuah *framework* yang sama, dengan harapan akan tercipta *trust* dan *mutual understanding*. Selaras dengan teori resolusi konflik yang menyatakan bahwa hal mendasar dan yang paling penting dalam upaya resolusi konflik guna mencapai sebuah rekonsiliasi ialah membangun *mutual understanding* dan *trust* terlebih dahulu.³⁴ Proses membangun kepercayaan bukanlah hal yang mudah, perlu adanya proses yang cukup panjang.

Masyarakat sipil merupakan bagian yang sangat dinamis dan mampu memberikan pandangan yang lebih luas. Untuk menjadi sebuah gerakan yang lebih besar dan diharapkan mampu mengangkat kembali *track I* untuk kembali hidup, maka CSO yang ada tergabung dalam sebuah jaringan masyarakat sipil yang lebih besar.

Kehadiran GPPAC merupakan sebuah bentuk keterlibatan sipil global yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas keamanan di Semenanjung Korea guna mencegah terjadinya konflik dengan eskalasi yang tinggi hingga memicu kekerasan dengan cara-cara yang damai. GPPAC sebagai sebuah jaringan masyarakat sipil global merupakan representasi dari konsep *civic engagement* yang menjelaskan keterlibatan masyarakat sipil sebagai sebuah proses kolaboratif antar individu dan atau kelompok masyarakat sipil dalam sebuah jaringan yang lebih besar untuk mencapai tujuan bersama yakni perdamaian di Semenanjung Korea.

Dialog yang dilakukan oleh GPPAC sebagai *track II* merupakan representasi dari konsep *preventive diplomacy*, dimana langkah dialog yang dilakukan oleh GPPAC merupakan sebuah bentuk fasilitasi bagi pihak yang berkonflik untuk bertemu dalam satu forum bersama guna membahas mengenai isu-isu keamanan. Meskipun dalam forum tersebut sifatnya lebih luas, namun hal tersebut memberikan sebuah peluang bagi kedua belah pihak untuk saling berinteraksi satu sama lain sehingga

³³ *Civil Society Organization* selanjutnya akan disingkat menjadi CSO

³⁴ Op. Cit. Ho-Won Jeong, Hal. 193

dapat menghilangkan *stereotype* negatif yang selama ini melekat akibat perang di masa lalu. Dialog tersebut merupakan langkah awal dalam membangun *confidence*, dimana rasa saling percaya dan kejujuran merupakan permulaan yang paling penting dalam proses rekonsiliasi atau perdamaian. Dialog yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil setidaknya memberikan penawaran akan pengalaman yang berbeda mengenai pemecahan masalah.

GPPAC (*Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict*) menjadi pihak yang menginisiasi dialog konstruktif terkait konflik di Semenanjung Korea dengan menjadikan GPPAC-NEA (*North East Asia*) sebagai penanggung jawab proses dialog tersebut. Adapun dialog tersebut dilakukan secara netral dengan mengambil tempat di Ulaanbaatar, Mongolia. Lokasi tersebut ditentukan dengan pertimbangan bahwa Mongolia merupakan negara yang memiliki posisi netral di Kawasan. Hal ini sesuai dengan teori resolusi konflik yang menjelaskan bahwa untuk menjalankan proses *gradual reform* atau membangun kembali hubungan yang sebelumnya

retak dengan *building confidence and mutual understanding*, maka perlu adanya pihak ketiga netral yang memfasilitasi pihak berkonflik untuk bertemu.

Proses dialog Ulaanbaatar diposisikan sebagai sebuah alternatif dialog dalam rana *track II* guna mendukung dialog dalam rana *track I* yang sudah tidak lagi efektif. Selain itu, Ulaanbaatar proses juga menciptakan ruang bagi masyarakat sipil untuk memberikan berbagai macam bentuk perspektif pemikiran lintas batas wilayah termasuk melibatkan kedua negara berkonflik yakni Korea Utara dan Korea Selatan dalam satu forum yang sama. Baik Korea Utara maupun Korea Selatan memiliki ruang untuk saling berinteraksi dan menyampaikan ide serta gagasan yang mungkin akan susah dan tidak bebas jika dilakukan dalam level *track I*.

Ulaanbaatar dialog pertama kali dilaksanakan pada tanggal 23-24 Juni 2015 dan pertemuan kedua dialog Ulaanbaatar dilakukan pada tanggal 14-16 November 2016. Keterlibatan GPPAC dalam inisiasi perdamaian di Semenanjung Korea melalui dialog

merupakan salah satu pendekatan diplomasi yang bertujuan untuk menciptakan *gradual reform*. Perubahan bertahap tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mengubah tatanan sosial masyarakat yang sebelumnya penuh dengan rasa curiga dan permusuhan menjadi pola hubungan yang lebih harmonis.³⁵ Tujuan utama yang ingin dicapai masyarakat sipil dalam inisiasi proses perdamaian di Semenanjung Korea tidak lain ialah *peace agreement* oleh kedua belah pihak dan membangun *Regional peace rezim* serta membangun *Nuclear Free in East Asia (Mongolia Nuclear Free Zone)*.³⁶

Ulaanbatar dialogue yang dilakukan secara rutin setiap tahun menjadi langkah awal untuk mencairkan hubungan pihak berkonflik karena kesempatan kedua belah untuk bertemu pun menjadi lebih besar. Dengan demikian diharapkan lama-kelamaan akan muncul rasa *we-ness* atau yang dalam bahasa Korea lebih dikenal dengan istilah *cheong* diantara mereka. *Cheong* atau *we-ness* sendiri dapat terbentuk melalui beberapa hal

berikut yang antara lain ialah memori kolektif, harapan, rasa percaya, empati dan Identitas bersama.³⁷

Sering kali dalam masyarakat yang pernah berkonflik, ingatan pahit terkait kekerasan dan juga konflik akan terus membekas, sehingga lama-kelamaan akan muncul perasaan *victimhood* atau berlomba-lomba untuk menjadi Korban.³⁸ Jika sudah demikian, maka setiap pihak akan membenarkan pendapatnya dan cenderung menyalahkan pihak lainnya. Untuk itu, tujuan dari proses dialog yang dilakukan oleh masyarakat sipil ialah untuk membangun dan mengembangkan *framework* bersama terkait permasalahan yang dihadapi. Sehingga hal tersebut sedikit banyak akan mengurangi memori perang yang dimiliki, karena kedua pihak diberikan ruang untuk bertemu dan berbicara satu sama lain.³⁹

Meski masyarakat kedua negara tidak saling berinteraksi selama lebih dari 60 tahun, namun kepemilikan identitas bersama masih akan tetap

³⁵ Op. Cit. James A. Schellenberg, Hal. 99

³⁶ Peter Van-Tuijl selaku *Executive Director of GPPAC*, Wawancara dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2017

³⁷ Ichsan Malik. 2017. *Resolusi Konflik : Jembatan Perdamaian*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, Hal. 290-291

³⁸ *Ibid*, Hal. 290

³⁹ Op. Cit Ho-Won Jeong, Hal. 198

melekat pada diri masyarakat Korea. Hal ini sesuai dengan survei yang dilakukan oleh IPUS pada tahun 2016 yang menunjukkan bahwa 38.6 % dari 1.201 responden menyatakan bahwa penting untuk dilakukan unifikasi karena baik Korea Utara maupun Selatan berasal dari etnis yang sama. Sedangkan, 29.8% menyatakan jika unifikasi penting untuk menghilangkan ancaman perang antara Korea Utara dan Korea Selatan di masa yang akan datang. Sedangkan 31.6 % sisanya menjawab dengan berbagai macam alasan yang berbeda.⁴⁰

Tabel 1. 1 Alasan Pentingnya dilakukan Unifikasi⁴¹

(Unit: %)

	Because we are the same ethnic group	Because separated families need to be reunited.	To eliminate the threat of war between North and South Korea	So North Korean people can live better lives	So South Korea can become a more advanced country	Other	Total (N)
2007	50.7	8.9	19.2	1.8	18.7	0.7	1,200
2008	58.7	6.6	14.5	2.9	17.2	0.1	1,213
2009	44.3	8.5	23.5	4.2	18.7	0.8	1,203
2010	43.3	7.0	24.2	4.0	20.8	0.6	1,200
2011	41.9	7.2	27.3	4.8	17.7	1.1	1,201
2012	46.0	9.1	25.3	4.4	14.5	0.8	1,200
2013	40.4	8.3	30.8	5.5	14.2	0.8	1,199
2014	42.1	9.1	27.0	3.9	17.6	0.3	1,200
2015	40.7	12.3	26.3	6.3	14.0	0.4	1,200
2016	38.6	11.8	29.8	5.0	14.2	0.7	1,201

Berdasarkan data tersebut, dapat dikatakan bahwa diantara seluruh alasan yang dikemukakan, persamaan etnis merupakan alasan yang paling

⁴⁰ Peter Ward (Terj). 2017. *Unification Perception Survey 2016*. Seoul: Institute for Peace and Unification Studies Seoul National University, Hal. 36-37

⁴¹ Ibid, Hal. 37

banyak dipilih oleh responden meskipun data tersebut menunjukkan bahwa terjadi penurunan tiap tahun. Namun, hal tersebut tetap mendukung bahwa proses perdamaian dapat dimulai melalui *grassroot* dengan lebih meningkatkan intensitas dialog dan pertemuan antar CSO baik Korea Utara maupun Korea Selatan.

Menurut Jeong, dialog yang dilakukan oleh masyarakat sipil memungkinkan bagi anggota kelompok dari komunitas yang berseberangan untuk turut hadir guna membangun *mutual understanding* diantara mereka.⁴² Secara umum, proses dialog tersebut dilakukan secara informal dan tidak terlalu terstruktur, namun pembicaraan yang dilakukan dibangun untuk membangun dan mengembangkan *action plan* yang bisa diangkat di dalam forum-forum formal sesuai dengan agenda seting yang ada.⁴³

Karena sifatnya yang informal dan *unstructure*, tidak jarang forum dialog seperti yang dilakukan oleh GPPAC di *ulaanbataar* terdiri dari kelompok-kelompok kecil yang terorganisir dan

⁴² Op. Cit. Ho-Won Jeong, Hal. 198

⁴³ Ibid. Hal. 192

membahas mengenai beragam isu yang terjadi di kawasan.⁴⁴ Meskipun secara tidak spesifik membahas mengenai masalah yang dihadapi, namun setidaknya melalui forum tersebut kedua belah pihak dapat dipertemukan secara berkala, sehingga diharapkan muncul rasa saling mengerti dan percaya. Hal ini jika merujuk pada Malik, hal tersebut diistilahkan sebagai konsep “Strategi bubur panas”.⁴⁵

Kompleksitas konflik yang terjadi di Semenanjung Korea, turut berimplikasi terhadap proses perdamaian yang diupayakan. Keterlibatan CSO atau GPPAC dalam inisiasi perdamaian di Semenanjung Korea banyak dihadapkan oleh berbagai macam dinamika. Salah satu diantaranya ialah terkait bagaimana sulitnya membangun “trust” yang merupakan modal awal dari proses rekonsiliasi. GPPAC membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan pendekatan kepada Korea National Peace Committee (KNPC)⁴⁶ agar

turut serta ikut dalam dialog. Dalam proses tersebut, GPPAC melakukan pendekatan dengan berbagai macam cara yang salah satunya ialah terlibat dalam kegiatan-kegiatan *emergency assistance* seperti memberikan bantuan logistik dan obat-obatan kepada Korea Utara. Selain itu, GPPAC melalui jaringan American Friend Service Committee (AFSC)⁴⁷ juga mencoba untuk menarik kepercayaan kelompok masyarakat sipil Korea Utara melalui bidang pertanian dan agrikultur yang bekerja sama dengan Universitas-Universitas di Korea Utara.⁴⁸ Negosiasi dan pendekatan informal yang dilakukan tersebut pada akhirnya membuahkan hasil ketika Pemerintah Korea Utara memperbolehkan adanya *official delegation* yang diwakili oleh KNPC di tahun 2012.

Selain itu, dinamika lainnya yang dihadapi oleh GPPAC ialah semakin

⁴⁴ Ibid, Hal. 201

⁴⁵ Dr. Ichsan Malik, Wawancara dilakukan pada tanggal 5 Desember 2017 di Universitas Pertahanan

⁴⁶ Korean National Peace Committee selanjutnya akan disingkat menjadi KNPC

⁴⁷ American Friends Service Committee selanjutnya akan disingkat menjadi AFSC

⁴⁸ Lucy Roberts, *AFSC's Shared Security Vision for Northeast Asia: "Issues Pertaining to Peace and Human Security on the Korean Peninsula"*. GPPAC NEA, October 24 2017 diakses melalui <https://medium.com/reflections-on-peace-and-security-in-northeast/afscs-shared-security-vision-for-northeast-asia-issues-pertaining-to-peace-and-human-security-on-7595c26649f7> pada 29 Oktober 2017 pukul 14.45 Wib

mengecilnya Kelompok masyarakat yang menginginkan reunifikasi di Korea Selatan. Hal ini tidak lain disebabkan oleh generasi muda di Korea Selatan yang saat ini kurang tertarik dengan isu-isu terkait reunifikasi. Perkembangan ekonomi serta kehidupan sosial masyarakat Korea Selatan menjadi salah satu alasan mengapa saat ini banyak diantara mereka yang tidak lagi menjadikan isu keamanan di Semenanjung Korea menjadi prioritas. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian disertasi dari Campbell yang menyatakan bahwa terjadi penurunan *interest* masyarakat Korea khususnya generasi muda terkait isu reunifikasi di Semenanjung Korea.⁴⁹

Secara umum, masyarakat sipil di Korea Selatan dibagi menjadi tiga kelompok yakni kelompok generasi pertama, kedua, dan ketiga. Kelompok generasi pertama ialah generasi yang masih memiliki kedekatan hubungan dengan masyarakat Korea Utara. Generasi ini menganggap bahwa ide unifikasi ialah hal yang alami untuk

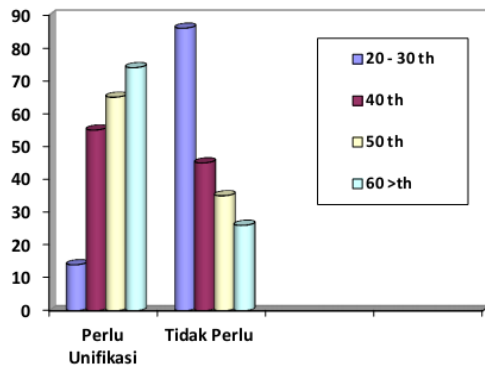
dilakukan dan harus dicapai. Sedangkan generasi kedua ialah generasi yang lahir ditahun 1960-an dan aktif pada masa pemerintahan Roh Moo-hyun, sehingga generasi ini sedikit banyak mendapatkan pengalaman dan pendidikan demokrasi di Korea Selatan. Sehingga, secara ideologi mereka mendukung adanya reunifikasi. Berbeda dengan dua generasi sebelumnya, generasi ketiga justru memiliki identitas sendiri dan nasionalisme yang berbeda. Generasi ketiga terdiri dari usia antara 20 hingga 30 tahun atau yang dalam bahasa Korea disebut dengan istilah *isipdae* lebih menganggap bahwa Korea Selatan merupakan negara yang berdiri sendiri dan mereka tidak mau mengidentifikasi diri sebagai satu kesatuan dengan masyarakat Korea Utara.⁵⁰ Hal ini didukung dengan survei yang dilakukan oleh *Institute for Peace and Unification Studies Soul National University* (IPUS) tahun 2016 yang menunjukkan bahwa terjadi perbedaan yang cukup signifikan antara masyarakat Korea Selatan generasi pertama, kedua, dan ketiga dalam dukungannya terkait unifikasi di

⁴⁹ Emma Louise Gordon Campbell. 2011. "Uri Nara" *our nations: Unification, Identity and Emergence of a New Nationalism Among South Korean Young People*. The Australian National University.

⁵⁰ Ibid, Hal. 57-58

Semenanjung Korea. Hal tersebut dapat ditunjukkan melalui bagan sebagai berikut

Bagan 1.1 Sikap Masyarakat Korea Selatan Terkait Unifikasi Berdasarkan Usia⁵¹



Berdasarkan bagan tersebut, dapat dilihat bahwa pada tahun 2016, masyarakat Korea Selatan dengan usia antara 20 sampai 30 tahun terhitung hanya kurang lebih 14% yang mendukung dilakukannya unifikasi. Berbanding terbalik dengan masyarakat usia 60 tahun atau lebih yang 75% mendukung untuk dilakukannya unifikasi. Sedangkan, untuk angka usia 50 tahun dan 40 tahun relatif mendukung dengan angka 65 % dan 55 %. Dengan demikian, hal ini dapat menunjukkan bahwa generasi muda di Korea Selatan tidak lagi menempatkan masalah terkait konflik Semenanjung

Korea menjadi prioritas mereka. Banyak diantara generasi muda Korea yang menganggap bahwa apabila unifikasi dilakukan maka masyarakat Korea Utara justru menjadi beban serta masalah baru bagi Korea Selatan.⁵² Meskipun demikian, masih banyak pula masyarakat Korea Selatan yang mendukung proses perdamaian dengan Korea Utara, khususnya para akademisi dan para aktivis kemanusiaan lainnya.

Ketakutan yang dialami oleh masyarakat Korea Selatan bahwa apabila terjadi unifikasi, maka penduduk dari Korea Utara justru nantinya dikhawatirkan akan menimbulkan masalah sosial yang baru bagi masyarakat Korea Selatan yang saat ini sudah makmur. Namun demikian, hal tersebut merupakan sebuah kesalahan berpikir bahwa perdamaian bukan berarti kedua negara harus bersatu atau reunifikasi. Perdamaian yang dimaksudkan dan yang ingin dicapai oleh kelompok masyarakat sipil atau GPPAC ialah bagaimana kedua negara menormalisasi kembali hubungan dan merubah perjanjian gencatan senjata

⁵¹ Op.Cit. Peter Ward (Terj), Hal. 36

⁵² Philo Kim, *Social Conflict and Identity Crisis in Unified Korea*, International Journal of Korean Unification Studies Vol. 24, No. 1, 2015, Hal. 25

yang sebelumnya telah disepakati menjadi perjanjian perdamaian. Pergantian tersebut tentu akan merubah status formal hubungan yang sebelumnya “perang” menjadi “damai”. Sehingga, memungkinkan bagi kedua pihak untuk meminimalisir tindakan provokasi dan permusuhan. Dengan demikian, menjadi kewajiban bagi GPPAC khususnya jaringan atau *working group* Korea Selatan untuk melakukan pendidikan perdamaian masyarakat umum khususnya kepada generasi milenial Korea Selatan.

Proses yang tidak mudah untuk memperoleh dukungan dan membangun kepercayaan serta *mutual understanding* baik di Korea Selatan maupun Korea Utara. Hal ini dikarenakan, kawasan Asia Timur merupakan salah satu kawasan yang masih sangat kental dipengaruhi oleh bayangan sejarah konflik dan perang dimasa lalu. Merujuk pada teori konflik, selama kondisi negara atau kelompok individu masih merasa terancam atas kehadiran dari negara atau individu lainnya, maka hal tersebut mengindikasikan adanya konflik

diantara mereka.⁵³ Selain itu, kehadiran Amerika Serikat di Semenanjung Korea membuat hubungan antara Utara dan Selatan menjadi lebih kompleks. Bagi KNPC, yang diperlukan untuk membangun perdamaian di Semenanjung Korea ialah baik Korea Utara ataupun Selatan membutuhkan ruang dimana salah satu caranya dengan mengurangi intervensi dari negara lain, khususnya Amerika Serikat untuk mundur dan memberikan sedikit ruang untuk Korea Utara dan Selatan. Menurut KNPC, ruang tersebut mampu tercipta jika saja Korea Selatan meninjau kembali hubungan kedekatannya dengan Amerika Serikat. Mengingat, tantangan terbesar bagi proses rekonsiliasi dan reunifikasi antara Selatan dan Utara ialah keberadaan pasukan Amerika Serikat di Korea Selatan.⁵⁴

Memori Kolektif akan sejarah perang di masa lalu serta kehadiran negara besar lainnya yang mengintervensi menjadi sebuah dinamika yang harus dihadapi oleh GPPAC dalam upaya inisiasi perdamaian di Semenanjung Korea. Tantangan besar

⁵³ Op. Cit. Johan Galtung, Hal 131

⁵⁴ Op. Cit. Lucy Robert

yang dihadapi ialah bahwa konflik di Semenanjung Korea terjadi secara terstruktur dan kompleks. Oleh karena itu, hal tersebut juga berimplikasi kepada proses pencarian jalan keluar yang pada akhirnya menjadi kompleks.

Hal ini merujuk pada teori konflik struktural bahwa konflik yang terjadi di Semenanjung Korea merupakan produk dari bagaimana sebuah konflik di masyarakat sengaja untuk dikelola dan dibentuk.⁵⁵ Selain itu, kondisi struktural tersebut sengaja dipertahankan oleh negara dengan membiarkan intervensi Amerika Serikat terus berlanjut di Semenanjung Korea melalui Korea Selatan. Hal inilah yang senantiasa membentuk ketegangan di Semenanjung Korea hingga saat ini. Bagi Korea Utara, Amerika Serikat merupakan aktor utama penyebab terjadinya perang dan perpecahan antara Korea Utara dan Selatan. Kehadiran Amerika Serikat di Semenanjung Korea bisa dibaratkan sebagai “Korek Api” yang sewaktu-waktu bisa menyulut ketegangan dan memunculkan konflik yang bukan tidak mungkin dapat menghasilkan kekerasan.

⁵⁵ Op. Cit. James A. Schellenberg, Hal. 97

Berdasarkan kepada teori konflik sosial struktural, pertentangan yang terjadi di Semenanjung Korea pada saat ini terbentuk akibat dipengaruhi oleh empat faktor pendorong, antara lain ialah:⁵⁶

- a. Pengembangan dan uji coba persenjataan oleh Korea Utara
- b. Penarativan sepihak baik oleh Korea Utara maupun Selatan
- c. Sanksi militer dan ekonomi yang diberikan oleh Amerika Serikat dan Korea Selatan terhadap Korea Utara
- d. Kompetisi militer dan ekonomi antara Amerika Serikat dan China turut mempengaruhi konflik di Semenanjung Korea.

Merujuk pada perspektif realis maka bisa dikatakan bahwa konflik di Semenanjung Korea bisa saja memang berusaha untuk dipertahankan oleh Amerika Serikat untuk mewujudkan kepentingannya di Kawasan Asia Timur, baik dalam hal rivalitas dengan Tiongkok atau juga sebagai pasar bagi perkembangan industri pertahanan di Amerika Serikat itu sendiri. Oleh karena itu, berdasarkan pada teori konflik yang

⁵⁶ Op. Cit. Kearney, Hal. 27-50

dijelaskan dengan pendekatan *social structural theory* dapat dikatakan bahwa konflik yang terjadi di Semenanjung Korea tidak lain terjadi karena dilatar belakangi oleh masalah struktural dari masa penjajahan Jepang dan dipertajam pada masa perang dingin yang memicu terjadinya perang sipil di Korea pada tahun 1950. Perang sipil (*korean war*) inilah yang kemudian menjadi awal dari ketegangan di Semenanjung Korea hingga sampai sekarang. Selain itu, kondisi *cold peace* tersebut sengaja dipertahankan oleh beberapa pihak yang memiliki kepentingan di kawasan yang dalam hal ini ialah kepentingan Amerika Serikat di Kawasan Asia Timur yang pada akhirnya turut berimplikasi kepada masalah keamanan di Semenanjung Korea.

Kompleksitas konflik dan hubungan antara Korea Selatan dan Amerika Serikat turut berimplikasi kepada kelompok masyarakat sipil atau CSO Korea Selatan yang justru tidak terlalu bebas untuk menyatakan pendapatnya dan perspektif mereka terkait perdamaian di Semenanjung Korea. Hal ini dikarenakan masih banyak dibayangi oleh kepentingan pemerintah Korea

Selatan yang berkepentingan dengan Amerika Serikat. Dari sini bisa dilihat bahwa terjadi dilema yang cukup besar dari sisi Korea Selatan baik dari sisi *track I* maupun *track II* terkait keberadaan Amerika Serikat di Korea Selatan. Khususnya pada saat ini, dimana tantangan terbesar yang dihadapi ialah terjadinya *global deteriorate* akibat perubahan pemerintahan dari Barack Obama ke pemerintahan Donald Trump yang berimplikasi pada tidak mudahnya masyarakat sipil untuk memiliki *constructive role* dalam menginisiasi proses perdamaian di Semenanjung Korea khususnya dari sisi Korea Selatan. Kompleksitas konflik dan hubungan aliansi antara Korea Selatan dan Amerika Serikat merupakan dinamika dan tantangan yang harus dihadapi oleh GPPAC dalam inisiasi proses perdamaian di Semenanjung Korea.

Dinamika lain yang dihadapi oleh GPPAC dalam inisiasi perdamaian di Semenanjung Korea ialah berkaitan dengan pendanaan. Sebagai kelompok masyarakat sipil, kegiatan operasional organisasi berjalan dengan disokong oleh pendanaan dari pihak ketiga. Tantangan terbesar yang dihadapi oleh

GPPAC ialah meyakinkan kepada pihak ketiga sebagai donatur terkait kegiatan GPPAC dalam proses perdamaian di Semenanjung Korea. Hal ini tidak lain berkaitan dengan persepsi negatif masyarakat terhadap Korea Utara yang mana bagi “normal people” masalah utama di Korea Utara ialah “Isolasi” dan “negara banyak sanksi”. Oleh karenanya, pihak donatur atau pihak ketiga akan berpikir ulang untuk memberikan dananya untuk proses perdamaian di Semenanjung Korea. Walaupun demikian, tidak seluruh pihak memandang skeptis Korea Utara. Masih banyak pihak yang mendukung dan mengharapkan agar perdamaian di Semenanjung Korea bisa segera terwujud.

Inisiasi perdamaian yang dilakukan oleh GPPAC melalui dialog dan juga pendekatan *People to People* akan terus dijalankan sebagai langkah alternatif ditengah kebuntuan *track I*. Hal ini merujuk berdasarkan pada kosep *civic engagement* yang dinyatakan bahwa.

“Civil society groups can help bring greater public representation into negotiatioin. Civil society, however speaks with many voices and stand in the **shadow** of domination by political elites. Civil society is not uniform, it

comes in many organizational forms it can have varying degress of autonomiy from the state and sometimes it can even serve as a subtitute for the state when government fail to serve their population’s need”.⁵⁷

Dalam pernyataan tersebut dijelaskan bahwa masyarakat sipil dapat membawa berbagai macam kelompok masyarakat untuk ikut dalam negosiasi dan berbicara mengenai satu permasalahan dalam berbagai macam perspektif. Masyarakat sipil, berdiri sebagai bayangan atas dominasi elit politik yang dalam hal ini ialah *track I*. Namun, khusus dalam inisiasi perdamaian di Semenanjung Korea masyarakat sipil yang dalam hal ini ialah GPPAC bukan lagi sekedar menjadi *shadow* atau bayangan tetapi melalui jaringan yang besar GPPAC berusaha untuk mendorong dan mengajak *track I* untuk kembali hidup dan bersama-sama mengupayakan proses perdamaian di Semenanjung Korea.

Sejatinya upaya yang dilakukan oleh *track II* tidak akan pernah cukup

⁵⁷ Wanis-St. John, Anthony. Darren Kew. *Civil Society and Peace Negotiations: Confronting Exclusion. International negotiation* Vol. 13, 11-36, 2008 didownload melalui <http://www.american.edu/sis/faculty/upload/wanis-kew-civil-society-and-peace-negotiations.pdf> pada 11/07/2017 pukul 11.33 wib, Hal. 13

untuk benar-benar mampu menciptakan perdamaian di Semenanjung Korea tanpa adanya dukungan dari *track I*. Tujuan utama dari GPPAC melalui dialog-dialog yang dilakukan ialah turut mendorong agar pemerintah dalam hal ini *track I* kembali berfungsi dan memulai kembali dialog untuk rekonsiliasi dengan satu tujuan yang sama yakni perdamaian bukan hanya terkait *national security* saja. Oleh karenanya, upaya yang dilakukan oleh *track II* haruslah berjalan beriringan dengan *track I* karena pada dasarnya kedua pendekatan tersebut merupakan sebuah kombinasi yang kuat untuk menciptakan perdamaian. Jika *track II* bergerak pada level yang sifatnya non-formal dan melakukan pendekatan melalui *grassroot* atau *bottom-up*, maka *track I* bergerak pada level formal yang mengupayakan perdamaian dari sisi kebijakan strategis berdasarkan peraturan hukum dan perundang-undangan sehingga sifatnya akan lebih mengikat.

Kesimpulan

a. Keterlibatan masyarakat sipil dalam inisiasi perdamaian diantaranya ialah dengan menginisiasi pertemuan

keluarga, pertukaran budaya, dan dialog/ *meeting* (*Ulaanbataar dialogue*). Cara-cara tersebut diharapkan mampu menciptakan *trust* dan *mutual understanding* diantara pihak yang berkonflik sehingga mampu untuk menemukan satu persamaan yang dapat mengikat kembali perasaan persaudaraan atau "*cheong/ simcheong*" dalam bahasa Korea.

b. Secara umum terdapat tiga dinamika yang dihadapi oleh masyarakat sipil (GPPAC) dalam keterlibatannya terkait upaya perdamaian di Semenanjung Korea, yakni:

1. Memori kolektif terkait perang dimasa lampu berakibat pada sulitnya membangun "*trust*" diantara pihak yang berkonflik
2. Mengecilnya kelompok masyarakat yang menginginkan reunifikasi di Korea Selatan, khususnya kalangan muda yang berusia 20-an tahun atau diistilahkan sebagai "*isipdae*"
3. Kuatnya aliansi antara Korea Selatan dengan Amerika Serikat

di Semenanjung Korea memicu ketegangan dengan Korea Utara

Saran

Sudah saatnya Indonesia menunjukkan kekhasan karakter kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif di hadapan negara-negara di dunia. Yang dimaksud dengan bebas aktif ialah bukan netral melainkan justru harusnya lebih aktif. Sebagai salah satu negara yang senantiasa menjunjung tinggi nilai toleransi, penghormatan terhadap HAM, Indonesia bisa menjadi pelopor dan mengajak negara-negara di kawasan Asia Tenggara melalui forum ARF (*Asean Regional Forum*) untuk menjadi fasilitator dialog bagi Korea Utara dan Selatan dalam rana *track I*.

Selain dalam tatanan *track I*, Indonesia melalui Universitas Pertahanan juga memiliki kesempatan yang besar untuk ikut memberikan kontribusi terhadap proses resolusi konflik di Semenanjung Korea melalui pendekatan secara *University to University*. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Korea Utara memang tertutup namun jika sifatnya Universitas maka mereka cenderung akan lebih terbuka. Unhan bisa menjadi

starting up untuk memulai inisiasi perdamaian dalam level *track II* di Semenanjung Korea, mengingat Korea Utara dari sisi perguruan tinggi akan lebih terbuka dan mau membuka ruang untuk berkomunikasi.

Pendekatan tersebut dapat dilakukan oleh Universitas Pertahanan dengan membuka kesempatan untuk pertukaran mahasiswa dan memungkinkan bagi mahasiswa dari Korea Utara dan Selatan belajar di Universitas Pertahanan. Meskipun dalam kenyataannya nanti baik mahasiswa Korea Utara dan Selatan mempelajari hal-hal yang sifatnya jauh dari konflik dan perdamaian di Semenanjung Korea, namun kehadiran mereka dalam satu tempat yang sama memungkinkan bagi mereka untuk saling bergaul dan berinteraksi satu sama lain. Peluang-peluang inilah yang harus terus dikembangkan.

Secara teoritis, Keterlibatan masyarakat sipil dalam proses inisiasi perdamaian di Semenanjung Korea merupakan solusi alternatif dalam upaya resolusi konflik. Perdamaian ialah *zone of possibility* dimana jika satu upaya gagal maka harus membuka

peluang yang lainnya. Kemacetan *track I* yang saat ini dialami dalam proses perdamaian di Semenanjung Korea bisa saja diterobos dengan *leadership* yang kuat. Didorong dengan inisiatif yang kuat dari pemimpin dan besarnya dorongan dari *track II*, perdamaian di Semenanjung Korea bukanlah hal yang mustahil.

Saran selanjutnya ialah, menjadikan semenanjung Korea sebagai persemakmuran Korea. Dimana untuk mencapai perdamaian, baik Korea Selatan maupun Utara tidak perlu melakukan unifikasi atau penggabungan negara dalam satu administrasi. Tetap menjadi dua identitas negara yakni Korea Selatan dan Utara, namun

reformasi ekonomi, politik, dan sosial tetap berjalan. Dalam artian, kedua negara harus saling mendukung dalam satu kesatuan yakni Korea yang damai. Masyarakat bebas untuk bertemu dan berpergian baik dari Selatan ke Utara atau sebaliknya. Semua hal tersebut pasti akan terjadi, dan pertama-tama yang harus dilakukan ialah mengubah perjanjian gencatan senjata menjadi perjanjian damai.

Referensi:

Kearney, Caroline. 2017. *Strengthening Understanding Through Dialogue: A Peacebuilding Approach to the Korean Peninsula Conflict*. Siem Reap: Centre for Peace and Conflict Studies.¹ Ibid

Ana Bourse, dkk. 2015. *Creating Spaces for Dialogue: a Role for Civil Society*. Den Hague: GPPAC (Glbal Partnership for the Prevention of Armed Conflict) didownload dari http://www.gppac.net/documents/130492842/131171520/060-009_creating+Spaces_DigitalPublication.pdf pada 14/03/2017 pukul 14.59. Hal: 18-39

Ulaanbaatar Process for Dialogue in Northeast Asia, diakses melalui <http://www.gppac.net/ulaanbaatar-process>, diakses 15 Agustus 2017 pukul

Johan Galtung. 2017. *Hanbook of Peace and Conflict Studies*. New York: Routledge

- Kenneth E. Boulding. 1963. *Conflict and Defense*. New York: Harper
- James A. Schellenberg. 1996. *Conflict Resolution: Theory, Research, and Practice*. New York: State University of New York Press
- Immanuel Wallerstein. 1974. *The Modern World System*. New York: Academic Press
- Robert L. Worden. 2008. *North Korea: A Country Study*. Library of Congress: Federal Research Division
- Ho-Won Jeong. 2010. *Conflict Management and Resolution: An Introduction*. New York: Routledge
- Bertrand G. Ramcharan. 2008. *Preventive Diplomacy at the UN*. Indiana University Press: Bloomington. Hal-28-32 didownload melalui [http://dl.lux.bookfi.net/genesis/537000/89a3b9c50dcba19900da3f316dbdfcad/_as/%5BBertrand_G._Ramcharan%5D_Preventive_Diplomacy_at_th\(BookFi\).pdf](http://dl.lux.bookfi.net/genesis/537000/89a3b9c50dcba19900da3f316dbdfcad/_as/%5BBertrand_G._Ramcharan%5D_Preventive_Diplomacy_at_th(BookFi).pdf) pada 11/11/2016 pukul 17.28 wib
- Muggah, R & White, N. 2013. *Is There a Preventive Action Renaissance? The Policy and Practice of Preventive Diplomacy and Conflict Prevention*. NOREF
- Boutros-Boutros Ghali. 1992. *An Agenda for Peace: Preventive Diplomacy, Peacemaking, and Peacekeeping*. Report of the Secretary-General pursuant to the statement adopted by the Summit Meeting of the Security Council on 31 January 1992. Hal. 45-51 didownload melalui <http://graduateinstitute.ch/files/live/sites/iheid/files/shared/Winter/protected/Boutros%20Boutros%20Ghali%20Agenda%20for%20Peace.pdf> pada 12/11/2016 pukul 17.57 wib
- Mark Pancer. 2015. *The Psychology of Citizenship and Civic Engagement*. Oxford: Oxford University Press.
- Robert D. Putnam. 1992. *Making Democracy Work: Civic Tradition in Modern Italy*. New Jersey: Princeton University Press.
- Enkhsaikhan, Jargalsaikhan, 2016. *Ulaanbaatar Process: It's Philosophy, Practice, and Achievements*. RECNA policy paper, 3. pp1-46. Universitas Nagasaki Jepang didownload melalui <http://naosite.lb.nagasaki->

u.ac.jp/dspace/bitstream/10069/36667/3/REC-PP-03-EN.pdf pada 21/06/2017
pukul

Dr. Ichsan Malik, Wawancara dilakukan pada tanggal 5 Desember 2017 di Universitas
Pertahanan

Peter Van-Tuijl selaku *Executive Director of GPPAC*, Wawancara dilakukan pada
tanggal 13 Oktober 2017

Ichsan Malik. 2017. *Resolusi Konflik : Jembatan Perdamaian*. Jakarta: Kompas Media
Nusantara,

Peter Ward (Terj). 2017. *Unification Perception Survey 2016*. Seoul: Institute for Peace
and Unification Studies Seoul National University

Lucy Roberts, *AFSC's Shared Security Vision for Northeast Asia: "Issues Pertaining to
Peace and Human Security on the Korean Peninsula"*. GPPAC NEA, October 24
2017 diakses melalui <https://medium.com/reflections-on-peace-and-security-in-northeast/afscs-shared-security-vision-for-northeast-asia-issues-pertaining-to-peace-and-human-security-on-7595c26649f7> pada 29 Oktober 2017 pukul 14.45
Wib

Emma Louise Gordon Campbell. 2011. *"Uri Nara" our nations: Unification, Identity and
Emergence of a New Nationalism Amongst South Korean Young People*. The
Australian National University.

Philo Kim, *Social Conflict and Identity Crisis in Unified Korea*, *International Journal of
Korean Unification Studies* Vol. 24, No. 1, 2015

Wanis-St. John, Anthony. Darren Kew. *Civil Society and Peace Negotiations:
Confronting Exclusion*. *International negotiation* Vol. 13, 11-36, 2008 didownload
melalui <http://www.american.edu/sis/faculty/upload/wanis-kew-civil-society-and-peace-negotiations.pdf> pada 11/07/2017 pukul 11.33 wib,

GPPAC (Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict), 2013. *GPPAC
Statement Calling for Immediate Dialogue on the Korean Peninsula Crisis*.
didownload melalui http://www.wanep.org/wanep/files/2013/april/GPPAC_Statement_on_Korean_Crisis_April_2013.pdf pada 14/03/2017 pukul 15.18 wib

GPPAC (Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict). 2010. *GPPAC Northeast Asia Statement for Peace on the Korean Peninsula*. didownload melalui

http://peaceboat.org/english/content/documents/GPPACNEA_FinalDec24.pdf

pada 14/03/2017 pukul 15.16 wib